KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7182-0096-1178-7174

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099090/2025

Revisi ke 01
Tanggal : 22 Februari 2025

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(03)	Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi	:	(03)	JAWA TENGAH
4. Kode/Nama Satker	:	(099090)	PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Sebesar	:	Rp. 694.605.000	(ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	694.605.000
005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	694.605.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	694.605.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SEMARANG II	(134)	Rp.	694.605.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7182-0096-1178-7174

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				694.605.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				694.605.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi		37,00	kegiatan	273.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum		36.00	kegiatan	248.000.000
		02 AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum		1.00	kegiatan	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		78,00	orang	187.740.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara		78.00	orang	187.740.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		659,00	Perkara, Berkas Perkara	233.865.000
Rincian Output	:	01 BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat		623.00	Perkara	209.700.000
		02 BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat		36.00	Perkara	24.165.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025

DS:7182-0096-1178-7174

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	694.605.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	694.605.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7182-0096-1178-7174

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099090	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		
1049.AEA	Koordinasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	273.000	-	-	-	273.000	03 . 51	
01	RM	-	273.000	-	-	-	273.000	134@	
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	187.740	-	-	-	187.740	03 . 51	
01	RM	-	187.740	-	-	-	187.740	134@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (03.51 JAWA TENGAH / KOTA SEMARANG)	-	233.865	-	-	-	233.865	03 . 51	
01	RM	-	233.865	-	-	-	233.865	134@	
	JUMLAH	**-**	**694.605**	**-**	**-**	**-**	**694.605**		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7182-0096-1178-7174

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode/Nama Satker : (099090) PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**099090**	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	34.234	14.150	0	0	0	142.505	503.709	0	0	0	0	8	694.605
		BELANJA BARANG	34.234	14.150	0	0	0	142.505	503.709	0	0	0	0	8	694.605
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	34.234	14.150	0	0	0	142.505	503.709	0	0	0	0	8	694.605
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	34.234	14.150	0	0	0	142.505	503.709	0	0	0	0	8	694.605
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.085	12.910
		- PNBP (425239)	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075	1.085	12.910

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
IV A. B L O K I R

DS:7182-0096-1178-7174

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099090] PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		
099090	**PENGADILAN TINGGI SEMARANG**		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	462.986
	52 Belanja Barang	Rp.	462.986
005.03.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		
1049	**Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**		
1049.AEA	**Koordinasi**		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	195.356
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.AEF	**Sosialisasi dan Diseminasi**		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.800
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	7.290
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	169.650
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1049.BCA	**Perkara Hukum Perseorangan**		
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	41.712
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

KODE	URAIAN		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	10.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	28.178
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099090/2025
IV B. C A T A T A N

DS:7182-0096-1178-7174

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099090] PENGADILAN TINGGI SEMARANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002